



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI HESTININGSIH
2. Jabatan : CAMAT
3. NHK : 760570

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.439.600.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 189 m2/98 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 189.000.000
2. Tanah Seluas 327 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 163.500.000
3. Tanah Seluas 199 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 199.000.000
4. Tanah Seluas 1321 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, WARISAN Rp. 396.300.000
5. Tanah Seluas 710 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, WARISAN Rp. 142.000.000
6. Tanah Seluas 1749 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, WARISAN Rp. 349.800.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 171.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ GE8 1.5 E AT (CKD) Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO X1H02N35M1 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO NC12A1CF A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO NC12AF2CBI A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.700.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.617.300.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.617.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.